

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK,
DAN SOSIALISASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM**

NORSAIN

(sain_unija@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

ABU YASID

(yasid_edy@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap persepsi wajib pajak.. Penelitian ini dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan sampel sebanyak 90 responden dari wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto usaha di bawah 4,8 M. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif (X_1), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak, kemudahan membayar pajak (X_2), berpengaruh positif terhadap persepsi wajib, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 (X_3) berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak.

Kata kunci: Persepsi wajib pajak, PP No 46 tahun 2013.

Keberadaan UMKM dan koperasi ditengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 banyak usaha besar gulung tikar (bangkrut), sementara itu UMKM sebagian besar mampu bertahan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil survey Deperindagkop dan PKM (Pengusaha Kecil dan Menengah) diperoleh gambaran dari 225.000 UMKM 64.1% masih mampu bertahan, 0.9% mampu berkembang, 31.0% mengurangi kegiatan usahanya, 4.0% menghentikan usahanya (Suharto, 2001). Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh

para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Mutiarra mutiah dan gita arrasi, 2009).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur,

memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan juga masih sederhana. Laporan keuangan hanya sebatas sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya.

Pajak atas Usaha Kecil Menengah telah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tanggal 12 Juni 2013 tentang pajak penghasilan UMKM dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya :

1. PPh final sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto.
2. Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (OP) dan badan diluar bentuk usaha tetap.
3. Pendapatan berasal dari kegiatan usaha, bukan dari pekerjaan atau sebagai individu profesional.
4. Penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak (WP) baik badan maupun orang pribadi. Pemerintah juga mengatur WP yang tak dikenai pajak. WP orang pribadi yang tidak dikenai pajak 1 persen adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya yaitu:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

PP No.46 Tahun 2013 ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan

penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Orang Pribadi dan Badan wajib membayar pajak akan tetapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dengan system pemungutan *self assessment system*.

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, 2011: 22). Namun dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment*, justru semakin menambah kebingungan dari wajib pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena ini, sangat mungkin terdapat berbagai persepsi, pemahaman atau

penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Resyniar (2013) melakukan penelitian mengenai perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya, (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak, (4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.

Penelitian ini melakukan pengembangan dengan menganalisis wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto dari usaha yang dijalani yang terdapat di Kabupaten Sumenep menggunakan metode kuantitatif. Karena di Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang besar terhadap

perkembangan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep, yang dilakukan sejumlah perbankan tahun 2011 mencapai ratusan milyar rupiah. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumenep, penyaluran dana KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, BTN, BRI, Bank Jatim, dan BNI pada tahun 2011 mencapai Rp. 116.055.301.759,00, dengan jumlah nasabah di 5 perbankan tersebut

sebanyak 10.298 pelaku UMKM. Di ambil dari *News Room* (2012). Dan jumlah penerimaan pajak untuk UMKM di Kabupaten Sumenep dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat di lihat bahwa penerimaan pajak UMKM masih relatif kecil, juga dapat di lihat jumlah penerimaan pajak setelah di terapkannya PP No 46 tahun 213 dari bulan Juli sampai September menunjukkan masih kurang maksimal.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak UMKM Di Kabupaten Sumenep
Tahun 2009 – 2013

TAHUN	WP UK LAPOR	WP UK BAYAR	WP UM LAPOR	WP UM BAYAR
2009	1435	1,654,999,517	321	3,861,665,541
2010	1539	2,713,793,223	344	4,070,689,834
2011	1512	262,050,808	319	2,119,181,286
2012	1486	2,119,181,286	329	3,178,771,930
2013*	892	1,109,620,779	247	1,664,431,198

BULAN	WP LAPOR	WP UK BAYAR	WP UM LAPOR	WP UM BAYAR
JULI	149	238,996,475	27	358,494,713
AGUSTUS	104	142,400,498	29	213,600,748
SEPTEMBER	142	234,033,045	27	351,049,568

KETERANGAN

WP UK : WP badan / OP dengan omzet 0 - 300 juta

WP UKM : WP badan / OP dengan omzet 300 juta - 4.8 M

Sumber: Kantor Pajak Pratama Pamekasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dari penelitian ini yaitu adalah wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Pamekasan yaitu sebanyak 872 berdasar data tersebut peneliti menentukan jumlah sampel dengan rumus *slovin* dengan hasil 89,71193 yang di bulatkan menjadi 90 sampel. Lokasi pengambilan sampel berada di Kabupaten Sumenep Madura dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat di jangkau oleh peneliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan dan responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan *skalalikert*. Setiap jawaban dari responden akan di berikan skor angka yaitu angka 5 untuk pendapat sangat setuju sekali (SSS) dan angka 1 untuk tidak setuju (STS).

Angka 1 = Tidaksetuju (TS)

Angka 2 = KurangSetuju (kS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Angka 5 = Sangat Setuju Sekali (SSS)

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* table untuk tingkat signifikansi 5 % dari *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam hal ini *n* adalah jumlah sample. Jika *r* hitung > *r* table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila *r* hitung < *r* table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. (df)= $n-2 = 90-2 = 88$, Maka di dapat *r* tabel = 0,207. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 1.2 hasil uji validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variable X1, X2, X3, dan variable Y di atas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan telah *valid*, yang ditunjukkan dengan nilai masing-masing item pernyataan lebih besar daripada nilai *r* tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *croanbach alpha*. Suatu konstruk

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *croanbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2005). Cara mencari reliabilitas adalah dengan memasukkan kedalam rumus koefisien reliabilitas *croanbach alpha*. Jika koefisien *cronbach alpha* > 0,60, maka instrumen itu dapat diterima atau reliable, tetapi apabila sebaliknya *cronbach alpha* lebih kecil dari 0,60, maka pernyataan tersebut ditolak atau tidak reliable (Ghozali,

2005:48). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Berdasarkan dari Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan persepsi wajib pajak mempunyai nilai *cronbach alpha* > 0,60 Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan reliabel

Tabel 1.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Perubahan tarif	X _{1.1}	0,852	0,207	Valid
	X _{1.2}	0,844	0,207	Valid
	X _{1.3}	0,738	0,207	Valid
Kemudahan membayar pajak	X _{2.1}	0,628	0,207	Valid
	X _{2.2}	0,707	0,207	Valid
Sosialisasi	X _{3.1}	0,516	0,207	Valid
	X _{3.2}	0,627	0,207	Valid
Persepsi wajib pajak	Y _{1.1}	0,820	0,207	Valid
	Y _{1.2}	0,803	0,207	Valid
	Y _{1.3}	0,704	0,207	Valid
	Y _{1.4}	0,663	0,207	Valid
	Y _{1.5}	0,678	0,207	Valid
	Y _{1.6}	0,559	0,207	Valid
	Y _{1.7}	0,663	0,207	Valid

Tabel 1.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
X ₁ , X ₂ , X ₃ dan Y	0,940	Reliabel

Sumber: Output SPSS

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak ada beberapa cara diantaranya dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogrov-Smimov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif.

H_0 : residual berdistribusi normal

H_1 : residual tidak berdistribusi normal

Karena nilai signifikan pada tabel diatas menunjukkan nilai $0,341 > 0,05$ maka H_1 di tolak sehingga dapat disimpulkan data dalam model berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam suatu model estimasi. Dalam penelitian tidak terdapat adanya multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai VIF < 10 . Nilai cutoff yang dipakai dalam menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir.

Dari hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari

0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 95%. Hasil perhitungan nilai VIF untuk variabel perubahan tarif (X_1),kemudahan membayar pajak (X_2) dan sosialisasi (X_3) sangat jauh dari dari 10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* berbeda disebut homokedastisitas model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *scatterplot*. Dasar analisis *scatterplot* adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan kalau tidak membentuk pola atau kalau titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti terjadi heteroskedastisitas.

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 1.4
Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25584906
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.939
Asymp. Sig. (2-tailed)		.341

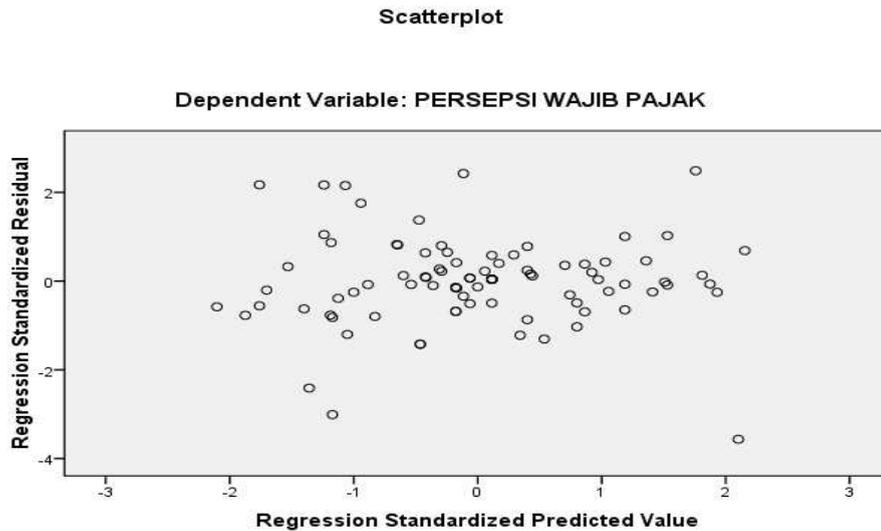
a. Test distribution is Normal.

Tabel 1.5
Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PERUBAHAN TARIF	.528	1.895
KEMUDAHAN BAYAR PAJAK	.582	1.719
SOSIALISASI	.654	1.528

a. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK

Grafik 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS

Tabel 1.6
Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.080

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF

b. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK

Sumber: Output SPSS

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) yang biasa muncul dalam

penelitian *time series*. Pengujian adanya autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson (DW test)*. Nilai DW sebesar 2,080 dalam tabel Durbin Watson, dengan pengambilan keputusan tidak terjadi Autokorelasi karena $DW > 2$.

Analisis Regresi Berganda

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji statistik F)

Berdasarkan Tabel 1.7 secara bersama-sama/simultan (uji F) variable bebas yang terdiri dari perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen yaitu persepsi wajib pajak. Hal ini dapat dilihat nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji statistik t)

Untuk menguji apakah variabel independen di atas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t. Berikut ini disajikan Hasil Uji t dengan menggunakan program SPSS versi 20.00.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS menghasilkan bahwa nilai signifikan untuk $X_1 = 0,000 < 0,05$ sehingga maka X_1 signifikan berpengaruh terhadap Y begitupun dengan nilai signifikan untuk $X_2 = 0,000 < 0,05$ sehingga maka X_2 signifikan berpengaruh terhadap Y dan untuk $X_3 = 0,000 < 0,05$ sehingga maka X_3 signifikan berpengaruh terhadap Y.

Model regresi yang di gunakan adalah model regresi dengan variable persepsi wajib pajak (Y) sebagai variable dependen (terikat) dan variable perubahan tarif (X_1), kemudahan membayar pajak (X_2), dan sosialisasi (X_3) sebagai variable independen (bebas).

Tabel 1.7
Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61.181	3	20.394	301.047	.000 ^a
Residual	5.826	86	.068		
Total	67.007	89			

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF

b. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK

Tabel 1.8
Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.231	.107		2.165	.033
PERUBAHAN TARIF	.445	.032	.599	13.686	.000
KEMUDAHAN BAYAR PAJAK	.284	.038	.316	7.577	.000
SOSIALISASI	.190	.040	.187	4.767	.000

a. Dependent Variable: PERSEPSI WAJIB PAJAK

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 1.9
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.956 ^a	.913	.910

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI, KEMUDAHAN BAYAR PAJAK, PERUBAHAN TARIF

Berdasarkan Tabel 1.8 model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0.231 + 0.445X_1 + 0.284X_2 + 0.190X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan pengertian sebagai berikut:

1) Y = Nilai konstanta sebesar 0.231 artinya apabila variabel perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 bernilai nol, maka persepsi wajib pajak sebesar 0,231.

- 2) X_1 =Variable perubahan tarif berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak dengan nilai koefisien 0.445, artinya setiap pertambahan 1% variable perubahan tarif akan menaikkan persepsi wajib pajak sebesar 0.445.
- 3) X_2 =Variable kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak dengan nilai koefisien 0.284, artinya setiap pertambahan 1 variable kemudahan membayar pajak akan menaikkan persepsi wajib pajak sebesar 0.284.
- 4) X_3 =Variable Sosialisasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak dengan nilai koefisien 0.190 artinya setiap pertambahan 1 variabel Sosialisasi akan menaikkan persepsi wajib pajak sebesar 0.190.

Dari persamaan di atas dapat di lihat bahwa di antara ketiga variable independen perubahan tariff dalam PP No 46 tahun 2013 (X_1) mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap persepsi wajib pajak.

Adjusted R-square pada Tabel 1.9 adalah 0,913 artinya variable perubahan tarif (X_1), kemudahan membayar pajak (X_2), dan sosialisasi (X_3) secara bersama – sama mampu menjelaskan persepsi wajib pajak (Y) sebesar 91,3 % selebihnya 8,7% dijelaskan variabel lain dan juga eror.

Hasil penelitian persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP No 46 tahun 2013 di Kabupaten Sumenep di ketahui bahwa

ketiga variabel tersebut mempengaruhi persepsi wajib pajak di Kabupaten Sumenep.

Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian terhadap empat variable penelitian yaitu meliputi perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sosialisasi PP No 46 tahun 2013 dan persepsi wajib pajak maka dapat diketahui bahwa variable perubahan tarif ada pengaruh terhadap persepsi wajib pajak, kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Dan secara simultan (bersama – sama) tiga variable tersebut berpengaruh terhadap persepsi wajib paja.

Hubungan variabel perubahan tarif terhadap terhadap persepsi wajib pajak. terbaca nilai t_{hitung} sebesar 13,686. Sementara itu, untuk nilai t_{tabel} diperoleh nilai t_{tabel} 1,66724 dengan nilai signifikansi (sig 0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05, kemudahan membayar pajak terhadap persepsi wajib pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 7,557 dan t_{tabel} sebesar 1,66724 dengan signifikansi (sig 0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05, Dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 4,767 dan t_{tabel}

sebesar 1,66724 dengan signifikansi (sig 0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Untuk pengujian hipotesis terakhir yaitu semua variable X di uji secara bersama – sama mempunyai nilai F_{hitung} sebesar 301,047 dan F_{tabel} sebesar 2,71 dengan signifikansi (sig 0,000 < 0,05). Sehingga hipotesis diterima, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05.

- Resniar. 2013. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPNo.46 Tahun 2013*.
 Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*. Edisi 5. Jakarta: CV. Alfabeta.
 Waluyo. 2010. *Akuntansi pajak*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatarina. 2004. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*.
 Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
 Ita. 2007. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*
 Kuncoro, M. 2010. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga
 Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* .Edisi Revisi Yogyakarta :CV Andi Offset.
 Mardalis. 2009. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Cetakan 11. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
 Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*. Yogyakarta: BPF.